

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Australia berulah lagi! Bagaimana tidak, sudah dua dekade terakhir ini, Australia terus melanggengkan kebijakan restriktif akan isu migrasi. Bahkan pada 2019, Perdana Menteri Scott Morrison justru mengeluarkan rencana kerja bertajuk “*Planning for Australia’s Future Population*” (Australian Government, 2019). Salah satu kebijakan kontroversial dalam agenda kebijakan Scott Morrison tersebut ialah memangkas kuota imigran. Berdalih menyelamatkan masa depan populasi Australia, Scott Morrison justru memotong 15% kuota imigran permanen, yakni dari 190.000 menjadi 160.000 jiwa (Australian Government, 2019). Padahal, kebijakan restriktif para pendahulu Scott Morrison tidak sampai memangkas kuota imigran dalam jumlah besar. Scott Morrison menilai bahwa imigran tidak selalu mendatangkan “keuntungan”, melainkan berpotensi besar mengancam stabilitas domestik dan juga mengusik ketertiban umum di Australia (Griffith, 2019). Akibatnya, sejumlah pihak menganggap Scott Morrison menerapkan praktik pengalihan beban maupun kebijakan akan tanggung jawab internasional terkait pemenuhan hak para imigran dengan dalih mengamankan kedaulatan Australia dari lonjakan populasi imigran. Meski sejumlah pihak menentang dan menganggap lontaran pernyataan Scott Morrison akan imigran sekadar narasi publik, Scott Morrison tetap bersikukuh melanjutkan kebijakan pengurangan kuota imigran permanen Australia (Loughnan, 2019).

Memang, kebijakan pengurangan kuota imigran permanen merupakan realisasi dari janji politik Scott Morrison terkait “*Planning for Australia’s Future Population.*” Dengan kata lain, kebijakan pemangkasan jumlah penerimaan imigran merupakan cermin dari kebijakan populis nasionalistik Scott Morrison dalam menjamin keamanan nasional Australia, khususnya menyelamatkan Australia dari masalah “*The Population Bomb*”. Apalagi, populasi imigran di Australia mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa dalam kurun waktu 2011-2017 saja (Australian Bureau of Statistics, 2022). Tidak heran, jika Scott Morrison mengedepankan pendekatan khusus, yakni mengonstruksi isu migrasi menjadi isu keamanan atau dalam ranah hubungan internasional disebut “sekuritisasi”. Hal ini kemudian membuat isu migrasi di Australia sering kali terbingkai dalam konteks ancaman ketimbang dimaknai sebagai krisis kemanusiaan dan tidak perlu mendapatkan penanganan holistik (Davidson, 2016).

Di sisi lain, kebijakan pengurangan kuota imigran Scott Morrison juga digencarkan melalui wacana “*congestion-busting.*” Oleh karena itu, selain menurunkan kuota imigran ke level terendah, Scott Morrison juga memberlakukan kebijakan transfer imigran bahkan reformasi migrasi (Parliament of Australia, 2019). Sebagaimana peribahasa ‘adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung’, Scott Morrison paham betul bagaimana memenangkan hati rakyat. Dengan mengangkat isu populasi imigran pada saat menjelang pemilu federal dan perombakan besar-besaran pada sistem migrasi, pada akhirnya mampu meningkatkan status masalah populasi imigran ke tataran keamanan. Secara tidak langsung, masalah populasi imigran pun semakin terartikulasi dan mendapat tempat

tersendiri di tengah deliberasi politik jelang pemilu. Alhasil, legitimasi sekuritisasi terhadap imigran semakin mungkin dilakukan.

Tentu akan menjadi menarik jika mengkaji lebih jauh terkait bagaimana proses dan strategi Scott Morrison dalam mengonstruksi isu migrasi menjadi isu keamanan Australia. Apalagi, kebijakan migrasi Scott Morrison berbeda jauh dari para pemimpin Australia terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teori sekuritisasi serta konsep *securitization actor*, *referent object*, dan *functional actor* dalam menganalisis praktik sekuritisasi migrasi Scott Morrison. Argumen dalam penelitian ini, yakni suatu isu dapat diinterpretasikan menjadi suatu ancaman oleh aktor dan melalui serangkaian proses.

1.2. Perumusan Masalah

Pertanyaan utama dari penelitian ini ialah “Bagaimana praktik dan proses sekuritisasi isu migrasi Australia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Scott Morrison 2018-2019?”

1.3. Tujuan Penelitian

Singkatnya, tujuan penelitian ini berkaitan dengan analisis, penyajian informasi, dan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Oleh demikian, tujuan dalam penelitian ada dua, yakni umum dan khusus:

1.3.1. Tujuan Umum

Menjelaskan sekaligus menganalisis praktik dan proses sekuritisasi isu migrasi Scott Morrison selaku perdana menteri dalam mengemas isu migrasi menjadi suatu ancaman krusial akan keamanan nasional dan masyarakat Australia.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara spesifik, penelitian ini akan menyajikan informasi terkait permasalahan migrasi di Australia pada era kepemimpinan Scott Morrison sekaligus mengulik siapa saja aktor terlibat di balik upaya sekuritisasi isu migrasi Scott Morrison. Tidak lupa, penulis juga mencari tahu perbedaan agenda sekuritisasi migrasi antara pemerintah pra-Scott Morrison dengan Scott Morrison.

1.4. Kegunaan Penelitian

Suatu hasil penelitian tentu memiliki tujuan penyebarluasan manfaat. Oleh demikian, penelitian ini memiliki dua kegunaan, yakni teoritis dan praktis:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Manfaat akademis akan penelitian ini, yakni memperluas ruang lingkup pembahasan program studi Hubungan Internasional, terutama perihal studi keamanan. Di samping itu, penelitian ini juga menyumbangkan hasil analisis terkait agenda dan proses sekuritisasi isu migrasi di Australia, khususnya pada masa kepemimpinan Scott Morrison.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara sederhana, manfaat praktis dari penelitian ini, yakni memperluas wawasan para pembaca, baik dari kalangan akademisi maupun non-akademisi mengenai upaya sekuritisasi Scott Morrison terkait masalah migrasi di Australia. Terlebih, pembaca dapat menyadari bahwa pengemasan isu migrasi menjadi suatu ancaman akan keamanan di Australia tidak terlepas dari peran serta sejumlah aktor dan faktor, baik dari ranah domestik maupun internasional. Di samping itu, para

pembaca juga dapat mengetahui perbedaan agenda sekuritisasi migrasi antara pemerintah pra-Scott Morrison dan era Scott Morrison.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam menganalisis fenomena hubungan internasional, maka diperlukan pisau analisis seperti teori dan konsep. Oleh demikian, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran teori sekuritisasi untuk menjelaskan praktik dan proses sekuritisasi isu migrasi Australia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Scott Morrison. Guna mengulik informasi seputar penelitian, penulis merujuk pada tiga penelitian terdahulu, terutama seputar isu dan kebijakan migrasi Australia.

Literatur bertajuk "*Experience and Representation: Contemporary Perspectives on Migration in Australia*," karya Keith Jacobs memperlihatkan bahwa Australia mengalami sejumlah dinamika dalam pengimplementasian kebijakan isu migrasi (Jacobs, 2011). Setidaknya, Keith Jacobs mengklasifikasikan dinamika kebijakan migrasi di Australia menjadi tiga periode (Jacobs, 2011). *Pertama*, periode pemberlakuan kebijakan "*Immigration Restriction Act*" atau "*White Australia Policy*" (1901), di mana pemerintah Australia menolak kedatangan imigran selain imigran ras kulit putih guna mempertahankan kemurnian ras *Anglo-celtic*. *Kedua*, periode 1950-an hingga 1970-an, di mana pemberlakuan *White Australia Policy* semakin melemah. *Ketiga*, periode kontemporer pasca-1970-an, di mana kebijakan *White Australia Policy* dihapus secara total dan kebijakan *Universal Migration Policy* mulai diberlakukan secara berkelanjutan. Dalam arti, kebijakan migrasi Australia pada periode ini lebih memanusiaikan para imigran. Akan tetapi, Keith Jacobs menambahkan bahwa pada abad ke-21 ini

pemerintah Australia mulai membatasi diri dalam menerima imigran global dan terfokus pada imigran dari kelompok tertentu, seperti imigran terampil, keluarga imigran, dan imigran dari program migrasi kemanusiaan.

Di sisi lain, Skolastika Maing dan Elfan Kaukab dalam artikel bertajuk “Dilema Politik Luar Negeri Australia dalam Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka” membenarkan bahwa kebijakan migrasi Australia dewasa ini lebih sensitif dan restriktif (Maing & Kaukab, 2021). Terlebih, sejak masa kepemimpinan John Howard (1996-2007) hingga Scott Morrison (2018-2022), pemerintah Australia memantapkan diri untuk mengencangkan kebijakan sekuritisasi terhadap pengungsi dan pencari suaka. Hal ini dikarenakan pemerintah Australia menilai bahwa lonjakan kedatangan imigran berpotensi besar mengancam keamanan nasional Australia. Meskipun kebijakan migrasi Australia mendapat kecaman internasional dikarenakan dinilai tidak menerapkan prinsip *non-refoulement* sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi 1961 tentang Status Pengungsi, pemerintah Australia tetap bersikeras menjalankan kebijakan sekuritisasi dengan mengesampingkan simpati terhadap para migran dan pencari suaka.

Jika merujuk pada artikel bertajuk “*Securitisisation and the Function of Functional Actors*,” Rita Floyd menuturkan bahwa keberhasilan agenda sekuritisasi tidak terlepas dari peran tiga aktor pendukung, yakni parlemen, media, dan kelompok epistemik (Floyd, 2020). Singkatnya, Rita Floyd menyampaikan bahwa setiap aktor fungsional menyumbangkan peran sesuai kapabilitas masing-masing. Parlemen berperan besar dalam mengontrol dan mengawasi langsung agenda sekuritisasi pemerintah. Sedangkan, eksistensi media diperlukan untuk membentuk

citra kinerja sekaligus menyebarkan wacana keamanan pemerintah. Kemudian, lontaran narasi dari pemerintah tidak jarang turut dipengaruhi oleh kelompok epistemik. Sebab, kelompok epistemik kerap mengutarakan gagasan ataupun mengomentari tindakan pemerintah. Apalagi, kelompok epistemik dipandang lebih memahami isu jika dilihat dari latar belakang pengetahuan maupun pengalaman. Secara garis besar, penelitian Rita Floyd menyampaikan bahwa peran parlemen, media, dan kelompok epistemik berpeluang besar mempengaruhi opini publik akan agenda sekuritisasi pemerintah.

Dari ketiga literatur di atas, penulis menarik tiga benang merah. Pertama, isu migrasi adalah bagian integral dari kehidupan Australia. Kedua, pemerintah Australia sepanjang abad kedua puluh satu ini memang mengonstruksi isu migrasi menjadi ancaman akan keamanan. Ketiga, kesuksesan agenda sekuritisasi dipengaruhi oleh sejumlah aktor. Secara tidak langsung, ketiga literatur tersebut menyiratkan bahwa masalah migrasi di Australia memang sengaja dibingkai sebagai isu keamanan, dan pembingkaiannya tidak terlepas dari peran aktor. Meski demikian, ketiga literatur tidak menjelaskan bagaimana praktik dan proses sekuritisasi terhadap isu migrasi di Australia terjadi. Oleh demikian, penelitian ini akan berfokus dalam menguraikan praktik dan proses sekuritisasi isu migrasi di Australia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Scott Morrison. Lebih lanjut, penelitian ini akan menggunakan teori sekuritisasi Mazhab Kopenhagen dalam menganalisis proses sekuritisasi isu migrasi Scott Morrison.

Berbicara mengenai sekuritisasi, tentu tidak jauh-jauh dari fenomena keamanan, baik itu dalam dimensi tradisional maupun non-tradisional. Secara

sederhana, fokus dari keamanan tradisional ialah melindungi negara dan teritorial dari ancaman militer, sedangkan cakupan keamanan non-tradisional lebih luas daripada ancaman militeristis (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Dalam buku bertajuk "*Security: A New Framework for Analysis*," Barry Buzan, Ole Wæver, dan De Wilde menyatakan sepakat bahwa isu keamanan nasional dewasa ini tidak lagi terbatas pada persoalan militer dan negara saja, melainkan juga kedaulatan politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Hal ini cukup menunjukkan bahwa fokus dari agenda keamanan nasional ialah bukan lagi terfokus pada negara saja, melainkan juga pada aspek keamanan masyarakat. Kemudian, Barry Buzan dalam "*People, State, & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*," juga menuturkan bahwa agenda keamanan suatu negara kini semakin mengalami perluasan (Buzan, 2007). Meski demikian, konsep keamanan nasional tetap berakar pada politik kekuasaan karena menyangkut perihal 'survival' atau kemampuan negara dalam mempertahankan diri dari segala bentuk ancaman (Buzan & Hansen, 2009).

Salah satu isu keamanan non-tradisional paling krusial dewasa ini ialah isu migrasi. Baik dalam skala nasional maupun internasional, isu migrasi sudah menjadi perhatian negara dan publik. Sebab, isu migrasi merupakan bagian integral dari keamanan masyarakat (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Namun, kekhawatiran paling besar timbul akibat lonjakan migrasi internasional. Merujuk pada International Organization for Migration (IOM), migrasi internasional merupakan tindakan individu maupun sekumpulan individu yang bermaksud mengubah negara tempat tinggal dari negara asal ke negara tertuju (IOM, t.thn.). Dengan demikian,

dapat dipahami bahwa aktivitas migrasi internasional ini melewati perbatasan internasional. Sayangnya, lonjakan kedatangan imigran internasional berkemungkinan besar mengancam keamanan masyarakat dan negara yang dituju. Hal ini pun dibenarkan oleh Didier Digo dalam artikel bertajuk “*Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease*” (Bigo, 2002). Tidak jarang, negara mengambil langkah sekuritisasi dalam menangani permasalahan migrasi.

Sekuritisasi merupakan tindakan mengonstruksi suatu isu menjadi ancaman, dan ancaman tersebut dinilai menimbulkan masalah krusial bagi kelangsungan hidup masyarakat dan negara. Dengan kata lain, sekuritisasi merupakan wujud ekstrim dari politisasi keamanan dikarenakan ada pembingkaiannya suatu isu (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Barry Buzan, Ole Wæver, dan De Wilde selaku kelompok pemikir Mazhab Kopenhagen mendefinisikan sekuritisasi sebagai proses mengemas isu non-keamanan menjadi isu keamanan. Dalam arti, semula negara tidak menaruh perhatian serta tidak menganggap isu tersebut memerlukan keputusan politik (*normal politics*), akan tetapi eksistensi wacana dan konstelasi politik menyebabkan isu tersebut menjadi masuk ke ranah kebijakan publik dan dinilai perlu penanganan lebih lanjut (*emergency politics*) (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Dalam praktiknya, agenda sekuritisasi dapat terjadi secara berulang dan sejumlah ahli menyebutnya sebagai tindakan resekuritisasi (Donnelly, 2017). Singkatnya, resekuritisasi merupakan proses lanjutan dari agenda sekuritisasi isu sebelumnya, baik isu tersebut telah mengalami proses desekuritisasi maupun tidak sama sekali (McDonald, 2011).

Penyematan “keamanan” terhadap suatu isu bersifat *self-referential*. Dalam arti, masalah keamanan tidak melulu identik dengan ancaman nyata, melainkan sengaja dibingkai dan disajikan sebagai ancaman oleh aktor. Singkatnya, proses sekuritisasi tidak terlepas dari tiga hal, yakni *securitization actor*, *referent object*, dan *functional actor* (Buzan, Waever, & Wilde, 1998).

Pertama, *securitization actor* merupakan aktor penentu agenda utama sekuritisasi. Aktor sekuritisasi ini memiliki legitimasi untuk mengklaim kapan dan bagaimana suatu isu dikonstruksi menjadi *existential threat*, di mana suatu isu dinilai memiliki ancaman terhadap keamanan dan perlu penanganan khusus. Sebagai pelaku utama di balik pengemasan isu non-politis menjadi politis, aktor sekuritisasi memiliki kekuatan diskursif dan politis untuk mengidentifikasi serta membingkai suatu isu menjadi isu keamanan (Eroukhmanoff, 2018). Selama ada penyematan “keamanan”, aktor memiliki keleluasaan dalam menggencarkan agenda sekuritisasi. Pelaku sekuritisasi ini umumnya merupakan *top leaders*, seperti negara, elit, serta kelompok oposisi dan penekan (McDonald, 2011).

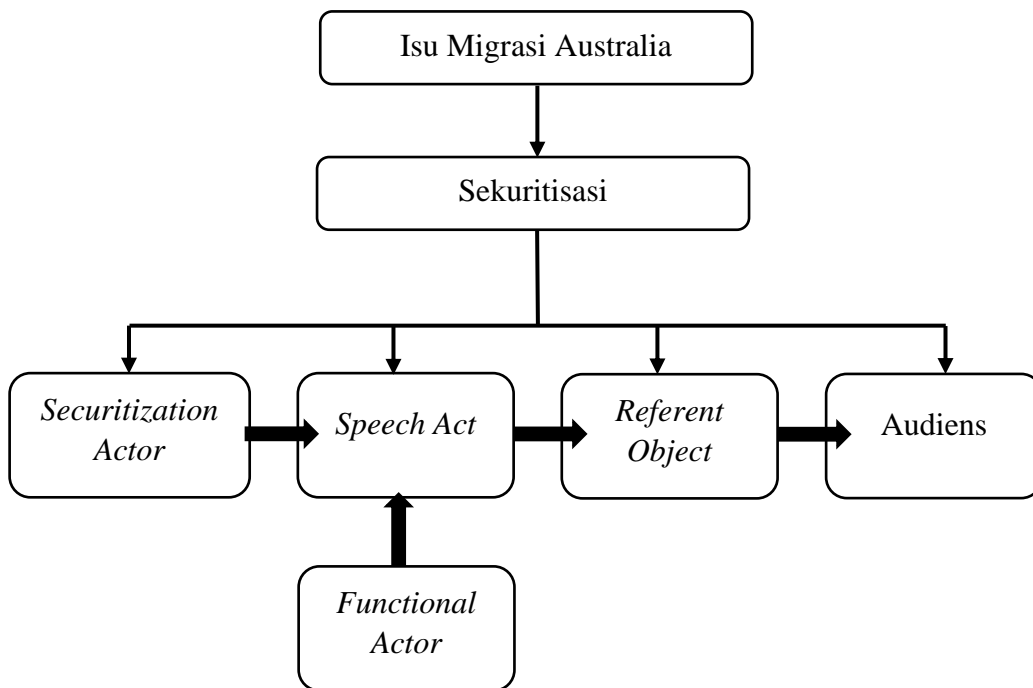
Guna menyukseskan agenda sekuritisasi, *securitization actor* menggencarkan *emergency actions* atau justifikasi dari aktor terkait dalam mengatasi penyebaran *existential threat* melalui lontaran *speech-act* atau narasi-narasi terkait wacana keamanan. *Speech act* merupakan sarana bagi *securitization actor* untuk menaikkan level isu non-politis menjadi skala prioritas publik (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). *Speech act* memainkan peran penting, yakni menggiring opini dan meyakinkan publik bahwa ancaman keamanan itu benar-benar ada. Di samping itu, *speech-act* merupakan komponen penentu

keberhasilan atau kegagalan agenda sekuritisasi (Basu & Nunes, 2013). Sebab, sekuritisasi dapat dikatakan berhasil jika publik menyetujui wacana keamanan dari aktor sekuritisasi. Jika *speech act* berhasil, maka aktor sekuritisasi dapat menggunakan instrumen dan mobilisasi kekuasaan selanjutnya, yakni menetapkan peraturan atau kebijakan guna menghentikan perkembangan ancaman. Barry Buzan *et al.* (1998), menekankan bahwa keberhasilan aktor dalam menyajikan suatu wacana menjadi ancaman bergantung pada keberhasilan aktor dalam mewacanakan keamanan. Oleh demikian, jika publik selaku audiens menerima wacana *speech act* dari aktor sekuritisasi, maka agenda sekuritisasi semakin mudah dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Kedua, *referent object* merupakan entitas yang secara eksistensial dianggap terancam dan aktor sekuritisasi perlu segera mengambil langkah pengamanan (Nyman, 2013). Apabila suatu isu dinilai mengancam *referent object*, maka aktor sekuritisasi akan melontarkan sebuah wacana keamanan melalui *speech-act*. Berbekal narasi-narasi dalam *speech act*, aktor sekuritisasi berusaha meyakinkan publik bahwa *referent object* benar-benar dalam situasi terancam. Dengan kata lain, lontaran *speech act* aktor sekuritisasi memuat *effects on interunit relations by breaking free of rules* atau narasi terkait seberapa besar dampak sekuritisasi terhadap pihak-pihak dan kebijakan terkait. Terkait ini, Barry Buzan *et al.* (1998) menyebutkan bahwa sekuritisasi itu bersifat *state-centric*, tidak heran jika negara mendominasi wacana sekuritisasi di mana negara memiliki kewenangan penuh dalam menentukan *referent object* sesuai kepentingannya. Akan

tetapi, perlu dipahami bahwa *referent object* tidak terbatas pada negara saja, melainkan juga non-negara.

Ketiga, *functional actors* merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam dinamika proses sekuritisasi. Peran dari aktor fungsional sendiri ialah memperkuat persepsi ancaman dan *speech-act* aktor sekuritisasi. Artinya, aktor fungsional bukanlah aktor utama sekuritisasi, melainkan aktor pendukung yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi opini publik atau bahkan keputusan politik. Terlebih, aktor fungsional ini dapat mewakili kepentingan individu atau kelompok tertentu, tergantung pada sektor apa yang hendak diwakili (Floyd, 2020).



Gambar 1.1. Skema Alur Pikir Penelitian

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

Dengan berangkat dari pendapat maupun paparan para ahli sebagaimana tertera dalam kerangka pemikiran teoritis dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian, maka definisi konseptual dalam penelitian ini dirumuskan menjadi:

1.6.1.1. Keamanan Nasional

Definisi keamanan nasional dalam penelitian ini merujuk pada interpretasi perspektif Mazhab Kopenhagen, yakni terkait keamanan tradisional dan non-tradisional. Sebagaimana pandangan Barry Buzan, Ole Wæver, dan De Wilde (1998) dalam *Security: A New Framework for Analysis*, agenda keamanan tradisional itu lebih menaruh fokus pada ancaman militer atau strategis, sedangkan agenda keamanan non-tradisional bukan sekadar menaruh perhatian pada ancaman militer dan negara lain saja, melainkan juga pada kedaulatan politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berangkat dari paparan tersebut, maka dapat dipahami bahwa agenda keamanan negara saat ini lebih mencerminkan skema keamanan non-tradisional, yakni melindungi negara dan masyarakat dari ancaman militer, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1.6.1.2. Migrasi Internasional

Secara spesifik belum ada definisi hukum formal tentang migrasi internasional. Namun, International Organization for Migration (IOM) mendefinisikan migrasi internasional sebagai tindakan di mana orang atau sekumpulan orang bermaksud mengubah negara tempat tinggal dengan melintasi

perbatasan internasional, baik itu dalam jangka pendek (sementara) maupun jangka panjang (permanen) (IOM, t.thn.). Dengan demikian, setiap negara berhak mengatur urusan migrasi di ranah teritorial masing-masing dengan menjalankan program migrasi. Guna memahami agenda migrasi internasional Australia, penelitian ini merujuk pada *Migration Act 1958* dan *Planning for Australia's Future Population*. Singkatnya, *Migration Act 1958* menekankan bahwa Australia memiliki program migrasi sendiri, dan program migrasi tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Australia (Australian Government, 2017). Kemudian, program kerja migrasi Australia semasa kepemimpinan Perdana Menteri Scott Morrison tertuang dalam "*Planning for Australia's Future Population*," di mana Scott Morrison meyakini bahwa lonjakan arus migrasi berdampak buruk pada populasi dan keamanan Australia (Australian Government, 2019).

1.6.1.3. *Securitization Actor*

Cakupan bahasan *securitization actor* atau aktor sekuritisasi dalam penelitian ini berpijak pada pandangan Barry Buzan, Ole Wæver, dan De Wilde. Singkatnya, Barry Buzan *et al.* (1998), meyakini bahwa tindakan sekuritisasi tidak bisa terjadi begitu saja, melainkan harus melewati proses panjang, dan proses tersebut tidak terpisahkan dari peran aktor sekuritisasi. Sebab, aktor sekuritisasi merupakan penentu agenda utama sekuritisasi. Apalagi, aktor sekuritisasi memiliki legitimasi untuk mengklaim dan membingkai suatu isu menjadi masalah keamanan. Disamping itu, Barry Buzan *et al.*, menuturkan bahwa pelaku sekuritisasi merupakan *top leaders*, seperti negara, elit, serta kelompok oposisi dan penekan.

1.6.1.4. *Referent Object*

Merujuk pada teori sekuritisasi Mazhab Kopenhagen, *referent object* dapat dipahami sebagai entitas yang secara eksistensial dianggap terancam (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Dengan demikian, aktor sekuritisasi perlu mengambil langkah pengamanan. Dalam arti, aktor sekuritisasi akan melontarkan wacana keamanan jika suatu isu dinilai mengancam *referent object*, baik itu berupa negara maupun non-negara.

1.6.1.5. *Functional Actor*

Proses sekuritisasi tidak terlepas dari peran aktor fungsional. Barry Buzan, Ole Wæver, dan De Wilde (1998) beranggapan bahwa aktor fungsional memainkan peran dalam memperkuat persepsi ancaman. Artinya, aktor fungsional akan melontarkan narasi guna mendukung wacana keamanan dari aktor sekuritisasi. Bukan sekadar mempengaruhi publik, aktor fungsional juga dapat mempengaruhi perumusan maupun keputusan politik.

1.6.2. Definisi Operasional

Dengan merujuk pada definisi konseptual, maka definisi operasional dalam penelitian ini diturunkan menjadi, berikut:

1.6.2.1. Keamanan Nasional

Sebagaimana agenda keamanan non-tradisional, keamanan nasional merupakan upaya memastikan keselamatan negara dan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan bahasan pada agenda keamanan Australia, terutama bagaimana Australia membingkai isu migrasi menjadi ancaman akan

keamanan negara dan masyarakat Australia. Alhasil, pemerintah Australia meyakini bahwa dampak dari lonjakan migrasi dapat mengancam kualitas hidup Australia, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan keamanan.

1.6.2.2. Migrasi Internasional

Isu migrasi internasional sudah menjadi bagian integral dalam urusan negara, termasuk Australia. Migrasi internasional sendiri dapat dipahami sebagai perpindahan penduduk dari negara asal ke negara tertuju. Dalam arti, perpindahan penduduk tersebut melewati perbatasan internasional. Sayangnya, lonjakan arus migrasi internasional membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup dan keamanan negara. Hal ini pun dialami oleh Australia. Oleh demikian, guna mengatur dan menekan lonjakan arus migrasi internasional, Australia merumuskan dan menjalankan sejumlah program migrasi terkait.

1.6.2.3. *Securitization Actor*

Secara spesifik, aktor sekuritisasi merupakan pelaku di balik pengemasan suatu isu menjadi ancaman keamanan. Dalam menjalankan agenda sekuritisasi, aktor sekuritisasi akan melontarkan wacana keamanan atau tindak tutur. Berangkat dari pandangan ini, penulis menitikberatkan penelitian pada wacana keamanan Perdana Menteri Scott Morrison selaku aktor sekuritisasi dalam membingkai isu migrasi di Australia menjadi masalah keamanan.

1.6.2.4. *Referent Object*

Guna menyukkseskan wacana keamanan, aktor sekuritisasi akan berusaha meyakinkan publik bahwa *referent object* benar-benar dalam situasi terancam dan

perlu segera diamankan. Penulis menginterpretasikan *referent object* sebagai objek sasaran dari wacana keamanan. Terkait ini, penulis menyadari bahwa *referent object* dari wacana keamanan isu migrasi Scott Morrison ialah negara dan masyarakat Australia itu sendiri.

1.6.2.5. Functional Actor

Wacana keamanan sering kali tidak terlepas dari peran serta aktor fungsional. Dalam agenda sekuritisasi, aktor fungsional mengeluarkan sejumlah narasi guna memperkuat *speech act* aktor sekuritisasi dan meyakinkan publik bahwa ancaman benar-benar ada. Penulis menyadari bahwa kebijakan sekuritisasi isu migrasi Australia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Scott Morrison tidak terlepas dari peran aktor lain yakni aktor fungsional, dan aktor fungsional ini mewakili kepentingan individu atau kelompok tertentu.

1.7. Argumen Penelitian

Penulis meyakini bahwa suatu fenomena isu memang dapat diinterpretasikan menjadi ancaman akan keamanan, dan selama proses interpretasi berlangsung, maka tidak akan terlepas dari peran aktor. Selaku aktor sekuritisasi, Scott Morrison bukan saja membingkai isu lonjakan imigran menjadi ancaman akan keamanan nasional, melainkan juga melontarkan narasi publik bahwa ledakan populasi imigran itu nyata dan berdampak buruk pada kualitas hidup Australia. Kemudian, penulis berkeyakinan bahwa ada keterlibatan aktor lain selama proses pembingkaihan isu migrasi Scott Morrison. Jika wacana keamanan Scott Morrison

diamini oleh mayoritas masyarakat Australia selaku audiens, maka akan berdampak pada percepatan agenda sekuritisasi migrasi Scott Morrison.

1.8. Metode Penelitian

Berangkat dari pola pikir deduktif terkait masalah keamanan, penelitian ini akan menjelaskan secara khusus dan komprehensif mengenai proses sekuritisasi isu migrasi di Australia semasa kepemimpinan Scott Morrison.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif. Secara garis besar, penelitian eksplanatif berusaha menjelaskan hubungan dan pengaruh dari suatu fenomena (Bungin, 2015). Oleh demikian, penelitian ini akan membahas mengenai proses sekaligus praktik sekuritisasi isu migrasi di Australia pada era Scott Morrison serta mengulik siapa saja aktor terlibat sehingga mampu mengemas isu migrasi menjadi ancaman nasional Australia.

1.8.2. Situs Penelitian

Penulis melakukan penelitian di sejumlah situs *online*, seperti *website* resmi Parliament of Australia, Department of Immigration and Citizenship, Department of Home Affairs, serta tidak menutup kemungkinan akan merujuk pada situs *online* lainnya.

1.8.3. Subjek Penelitian

Proses sekuritisasi isu migrasi Australia pada masa kepemimpinan Scott Morrison, terutama perihal pemangkasan kuota imigran permanen Australia merupakan subjek penelitian dari tulisan ini.

1.8.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis memakai jenis data kualitatif dan berusaha menguraikan proses dari suatu fenomena. Adapun maksud dari data kualitatif, yakni berfokus pada proses serta pemaknaan hasil (Aspers & Corte, 2019). Sebagaimana pernyataan McCusker dan Gunaydin (2015), tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami bagaimana individu maupun komunitas dalam merespons dan menerima suatu isu sehingga kualitas dalam proses penelitian kualitatif begitu diperhatikan.

1.8.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data sekaligus, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh pernyataan-pernyataan narasumber di sosial media lembaga resmi terkait. Kemudian, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tangan kedua, seperti buku, artikel jurnal, maupun kutipan pernyataan dari media massa, baik itu media massa domestik maupun internasional.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan penelitian ini bersumber dari riset lembaga terkait dan perpustakaan serta riset internet. Mengenai riset lembaga terkait dan perpustakaan, penulis mengumpulkan data-data sekunder berupa buku, surat kabar, artikel cetak, maupun majalah. Kemudian, penulis turut melakukan riset internet berupa artikel jurnal maupun berita *online*.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penafsiran atau interpretasi menekankan pada pemberian makna terhadap hasil analisis data, baik itu menjelaskan uraian atau capaian data, maupun mencari relevansi hubungan antar dimensi-dimensi uraian (Alvermann & Mallozzi, 2010). Oleh demikian, data dalam penelitian ini dianalisis secara komprehensif melalui metode *process-tracing*, yakni bukan sekadar menjelaskan hubungan sebab-akibat, melainkan juga menjelaskan suatu proses atau bagaimana suatu hal bisa terjadi (Bennett, 2010). Dalam arti, analisis data *process-tracing* dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana proses sekuritisasi isu migrasi di Australia terjadi, khususnya pada masa kepemimpinan Scott Morrison.

1.8.8. Kualitas Data

Mengenai kualitas dan validitas data, penelitian ini melakukan evaluasi data berdasarkan alat ukur, yakni kredibilitas dan transferabilitas (Sugiyono, 2015). Maksud dari kredibilitas, yakni sejauh mana data dan hasil penelitian dapat dipercaya berdasarkan pada kecukupan sumber informasi. Sedangkan, transferabilitas merupakan validitas eksternal untuk menunjukkan ketepatan hasil penelitian. Di samping itu, penelitian ini juga menerapkan analisis *historical situatedness*, yakni memperhatikan latar belakang sejarah, sosial, ekonomi, politik, dan keamanan Australia, khususnya menyangkut isu migrasi.